



PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROVINSI RIAU TAHUN 2024

BUKU I

PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

BUKU I

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Maksud dan Tujuan..... I-3

1.3. Dasar Hukum..... I-3

**BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH II-1**

2.1. Rencana Pendapatan..... II-1

2.1.1. Rencana Pendapatan Asli Daerah II-1

2.1.2. Rencana Pendapatan transfer..... II-2

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah II-2

2.3. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah II-2

BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH..... III-1

BUKU II

**BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN.....IV-1**

BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... V-1

DAFTAR TABEL

BUKU I

Tabel 2.1.	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2023	II-2
Tabel 3.1.	Sinergitas Program Pemerintah Provins Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III-1
Tabel 3.2.	Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	Lampiran 3.1- 1 s/d Lampiran 3.1-17
Tabel 3.3.	Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	Lampiran 3.3- 1 s/d Lampiran 3.3-55
Tabel 3.4.	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Indikator Kinerja	Lampiran 3.4- 1 s/d Lampiran 3.4-827

BUKU II

Tabel 4.1.	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lampiran 4.1- 1 s/d Lampiran 4.1-177
Tabel 4.2.	Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah	Lampiran 4.1.1- 1 s/d Lampiran 4.1.1-420
Tabel 4.3.	Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024	IV-2
Tabel 5.1.	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024	V-1

NOMOR : 40 / NK / XI / 2023
20 / NK / DPRD / 2023

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pekanbaru, 23 November 2023

Plt. GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA

(EDY NASUTION)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

selaku,
PIHAK KEDUA

(YULISMAN, S.Si, MM)
KETUA


(H. SYAFARUDDIN POTI, S.H, MM)
WAKIL KETUA


(H. AGUNG NUGROHO, S.E, MM)
WAKIL KETUA

(H. HARDIANTO, S.E, MM)
WAKIL KETUA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA-PPAS	PENETAPAN KUA-PPAS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.288.323.178.022	5.984.937.544.594	696.614.366.572
4.1.01	Pajak Daerah	4.289.148.880.745	4.382.173.075.085	93.024.194.340
4.1.02	Retribusi Daerah	21.323.361.800	25.970.361.800	4.647.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	597.539.778.218	1.097.539.778.218	500.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	380.311.157.259	479.254.329.491	98.943.172.232
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.624.024.234.065	4.069.181.213.000	445.156.978.935
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.624.024.234.065	4.069.181.213.000	445.156.978.935
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.780.040.000	7.780.040.000	5.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.780.040.000	7.780.040.000	5.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	8.915.127.452.087	10.061.898.797.594	1.146.771.345.507
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	5.953.086.339.298	6.427.157.657.615	474.071.318.317
5.1.01	Belanja Pegawai	2.862.429.010.163	2.941.863.873.818	79.434.863.655
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.731.448.314.455	2.873.273.891.127	141.825.576.672
5.1.05	Belanja Hibah	343.380.105.180	567.889.708.670	224.509.603.490
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.828.909.500	44.130.184.000	28.301.274.500
5.2	BELANJA MODAL	991.870.319.110	2.301.179.063.557	1.309.308.744.447
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.402.465.181	301.482.845.635	104.080.380.454
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.487.581.895	394.636.053.079	199.148.471.184
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	563.737.193.234	1.568.577.600.803	1.004.840.407.569
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.243.078.800	36.214.830.000	971.751.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	267.734.040	267.734.040
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000	40.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000	40.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	2.197.231.635.967	2.252.043.936.279	54.812.300.312
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.744.096.321.167	1.794.967.836.279	50.871.515.112
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	453.135.314.800	457.076.100.000	3.940.785.200
	Jumlah Belanja	9.182.188.294.375	11.020.380.657.451	1.838.192.363.076
	Total Surplus/(Defisit)	(267.060.842.288)	(958.481.859.857)	(691.421.017.569)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	367.060.842.288	958.481.859.857	591.421.017.569
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	367.060.842.288	958.481.859.857	591.421.017.569
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	367.060.842.288	958.481.859.857	591.421.017.569

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA-PPAS	PENETAPAN KUA-PPAS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000	0	(100.000.000.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	0	(100.000.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	0	(100.000.000.000)
	Pembiayaan Netto	267.060.842.288	958.481.859.857	691.421.017.569
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

Pekanbaru, 23 November 2023

Plt. GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY NASUTION

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

selaku,
PIHAK KEDUA

YULISMAN, S.Si, MM
KETUA

H. SYAFARUDDIN ROTI, SH, MM
WAKIL KETUA

H. AGUNG NUGROHO, SE, MM
WAKIL KETUA

H. HARDIANTO, SE, MM
WAKIL KETUA

**BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA GUBERNUR
DENGAN KETUA DPRD PROVINSI**

NOMOR: 42/BA-KSB/XI/2023
23/SKB/DPRD/2023
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023

TENTANG

**TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS
YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : EDY NASUTION
Jabatan : Plt. Gubernur Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 460

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : YULISMAN, S.Si, MM
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/subkegiatan baru berdasarkan Surat Edaran Nomor: S-128/PK/2023 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 September 2023, dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini. Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Plt. GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA

(EDY NASUTION)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

selaku,
PIHAK KEDUA

(YULISMAN, S.Si, MM)
KETUA

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Tentang Penambahan Kegiatan/Subkegiatan Baru Pada KUA dan PPAS yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Tahun Anggaran 2024

Nomor : 42/BA-KSB/x1/2023 & 23/SKB/OPRO/2023
Tanggal : 23 NOVEMBER 2023

NO	KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN DAK	KET
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	1.01.02.1.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
	1.01.02.1.01.0028		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	272,026,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	1.01.02.1.02.0006		Pembangunan Ruang UKS	1,600,333,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus		
	1.01.02.1.03.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	265,720,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03.0015		Pembangunan Ruang Bina Diri Untuk Tunagrahita (C)	943,415,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03.0013		Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	605,560,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	401,751,650.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	599,324,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03.0014		Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	223,020,000.00	DAK FISIK
	1.01.02.1.03.0040		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,871,848,000.00	DAK FISIK
2	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
	3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	15,265,227,000.00	DAK FISIK
	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Peraliran Darat		
	3.25.04.1.06.0001		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,213,000,000.00	DAK FISIK
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000.00	DAK FISIK
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
	3.25.02.1.01.0002		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	500,000,000.00	DAK FISIK
	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
	3.25.05.1.01.0004		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	500,000,000.00	DAK FISIK

3	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
	2.09.3.27.0.00.01.0007	UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian		
	3.27.03.1.01.10		Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	4,410,952,000.00	DAK FISIK
JUMLAH				29,792,176,650.00	

Plt. GUBERNUR RIAU



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Tahun 2024 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD tahun 2024 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen PPAS Provinsi Riau berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rancangan PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Provinsi Riau kedepan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan. Berikut uraian tentang rincina pendapatan dan penerimaan pembiyaan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2024:

2.1 Rencana Pendapatan

Pendapatan daerah yang direncanakan dianggarkan secara bruto meliputi semua rencana penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Rencana pendapatan tahun anggaran 2024 diperkirakan berjumlah Rp10.061.898.797.594,- Penerimaan pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.984.937.544.594,- Pendapatan Transfer sebesar Rp4.069.181.213.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.780.040.000,-

2.1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp5.984.937.544.594,- dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp4.382.173.075.085,- Retribusi Daerah sebesar Rp25.970.361.800,- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp1.097.539.778.218,- dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp479.254.329.491,-

2.1.2 Rencana Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp4.069.181.213.000,-

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Riau. Sedangkan PPAS Tahun 2024 harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, dengan Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermanfaat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)” serta Mengacu pada Visi RPJMN 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 tahap akhir, maka tema pembangunan Provinsi Riau 2024 adalah: “Mewujudkan Riau yang berdaya saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk sinergitas program Pemerintah Provinsi terhadap prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam tabel 3.1 berikut:

Program	Prioritas
A. Daya Saing Daerah	√ Peningkatan Perekonomian
	√ Penguatan Infrastruktur
	√ Peningkatan SDM
	√ Pelestarian lingkungan
B. Kesejahteraan	√ Kesejahteraan social
	√ Ketenagakerjaan
C. Bermartabat	√ Pengamalan nilai keagamaan
	√ Pelestarian budaya melayu
D. Unggul	√ Peningkatan pelayanan public
	√ Penyelenggaraan pemerintahan

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan plafon anggaran sementara pembiayaan sebesar Rp. 958.481.859.857,-

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	958.481.859.857
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	958.481.859.857
	Jumlah Penerimaan	958.481.859.857
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan	958.481.859.857